SALINAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, berat, dan tidak menyesatkan;

b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Daftar Informasi Publik di Kementerian Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1458);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Menetapkan daftar Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang meliputi:

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

M. NAZIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

M. Nazif, M Tr. (Han)

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 31 Maret 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
2	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 19 Mei 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
3	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 30 Juni 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
4	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 24 September 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
5	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 24 September 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
6	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 24 November 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
7	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 13 Desember 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
8	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab Sebab Lain Pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 20 Desember 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
9	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2021	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 31 Desember 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
10	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 31 Desember 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
11	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Tahun 2021-2025 Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 13 Mei 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
12	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 26 April 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
13	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengasuransian Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 25 Februari 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
14	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 30 Juni 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
15	LAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2021	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Kemenko Polhukam	*Hardcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
16	Aplikasi LPSE Kemenko Polhukam (SIRUP)	Anggota UKPBJ	Anggota UKPBJ	Kemenko Polhukam	Digital/ Aplikasi Pengadaan Barang Secara Elektronik	Setiap saat/berkala
17	Pengumuman seleksi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) di Kemenko Polhukam	Kepala Biro Umum	Kepala Biro Umum	Kemenko Polhukam	*Softcopy*	5 Tahun
18	Pengumuman CASN (Calon Aparatur Sipil Negara)	Kepala Biro Umum	Kepala Biro Umum	Kemenko Polhukam	*Softcopy*	5 Tahun
19	Profil dan Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
20	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Belanja dan Petunjuk Operasional Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
21	Perjanjian Kinerja Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
22	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
23	LHKPN Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Digital/ Aplikasi E-LHKPN dan Si Harka	5 Tahun
24	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Digital/ Aplikasi E-LHKPN dan Si Harka	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
25	Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
26	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
27	Indeks Demokrasi Indonesia	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
28	Indeks Kepuasan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Formulir *(Google Form)*	-

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
29	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
30	Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
31	Laporan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
32	Laporan penyelenggaraan SPIP di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
33	Ringkasan (*Executive Summary*) terkait isu-isu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
34	Profil Unit Kerja a. Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; b. Struktur Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; dan c. Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Softcopy*	2 Tahun
35	Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama a. Deputi Bidang Koordinasi b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c. Asisten Deputi Kerma Aspasaf d. Asisten Deputi Kerma Amerop e. Asisten Deputi Kerma ASEAN f. Asisten Deputi Kerja KSM	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
36	Program dan Kegiatan a. Rencana Strategis 2020-2024; b. Perjanjian Kinerja; c. Rencana Aksi TA. 2021; d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); e. Cascading; f. Indikator Kinerja Utama (IKU); g. Daftar Barang Milik Negara; h. Daftar Penyerahan LHKPN; dan i. Daftar Penyerahan LHKASN.	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Softcopy*	5 Tahun
37	Standar Operasional Prosedur: a. SOP Pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri b. SOP LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c. SOP BMN Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Softcopy*	5 Tahun
38	Survei Informasi Publik Data Respondedn Survei Eksternal Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
39	Rapat Reformasi Birokrasi	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	8 Maret 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Softcopy*	2 Tahun
40	Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
41	Struktur Organisasi unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
42	Profil Pejabat unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	1 Tahun
43	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
44	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
45	Perjanjian Kinerja	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
46	Rincian Anggaran Belanja (RAB)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
47	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
48	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
49	Indkator Kinerja Utama	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
50	Daftar Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
51	Daftar Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
52	Laporan Keuangan	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
53	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
54	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
55	Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
56	Laporan Pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
57	Indeks Kepuasan Layanan Tahun 2021	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun
58	Laporan Tahunan	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
59	Daftar Agenda yang Dilaksanakan	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
60	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2018, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun
61	Standar Layanan	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun
62	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun
63	Profil Unit Kerja: a. Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Tahun 2020 Unit Kerja Deputi	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	b. Struktur Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara c. Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara			Bidang Koordinasi Pertahanan Negara		
64	Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama: a. Deputi Bidang Koordinasi Hanneg b. Sesdep c. Asdep Koor Doktrin dan Strategi Pertahanan d. Asdep Koor Intelijen Pertahanan e. Asdep Koor Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan f. Asdep Koor Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Tahun 2020 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	2 Tahun
65	Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hanneg 2020-2024	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Desember 2019, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
66	Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TA 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Februari 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun
67	Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Tahun 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Januari 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun
68	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Tahun 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	April 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun
69	Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Hanneg	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Januari 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
70	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2022	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Desember 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun
71	LAKIN/LAKIP - LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TW I TA 2021 - LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TW I TA 2021 - LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TW I TA 2021 - LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TA 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	April 2021, Juli 2021, Oktober 2021, Februari 2021, Unit Kerja Deputi IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun
72	Penyerahan LHKPN	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	31 Maret 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
73	Penyerahan LHKASN	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	31 Maret 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	1-5 Tahun
74	Standar Operasional Prosedur - Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	2 November 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	5 Tahun
75	Profil Unit Kerja - Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas; - Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas; - Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
76	Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama: - Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas; - Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas; - Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimmas, dan Obvitnas - Asisten Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara - Asisten Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa - Asisten Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*/ Digital	2 Tahun
77	Program dan Kegiatan: - Renstra Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban MasyarakatTahun 2020-2024 - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - Rencana Aksi - Rencana Anggaran Belanja (RAB) - Perjanjian Kinerja (PK) - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Cascading - Daftar Barang Milik Negara (BMN) - Daftar LHKPN - Daftar LHKASN	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	1 s.d 5 tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
78	SOP Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	5 tahun
79	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik dan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban MasyarakatTahun 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*/ Digital	1 tahun
80	Profil Unit Kerja: a. Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa b. Struktur Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa c. Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
81	Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama: a. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa c. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan d. Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan e. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional f. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	2 Tahun
82	Program dan Kegiatan: a. Rencana Strategis 2020-2024 b. Laporan Akuntabilitas Kinerja c. Rincian Anggaran Belanja (RAB) d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) e. Perjanjian Kinerja f. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) *g. Cascading* h. Indikator Kinerja Utama (IKU) i. Daftar Barang Milik Negara j. Daftar Penyerahan LHKPN k. Daftar Penyerahan LHKASN	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	1 s.d 5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
83	Standar Operasional Prosedur: a. SOP Pelayanan Publik Unik Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa b. SOP Pelayanan Aparatur Sipil Negara c. SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan Masayrakat di Bidang Kesatuan Bangsa melalui Aplikasi Cepat, Efektif, Efisien, Tepat (siceepat)	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	5 Tahun
84	Survei Informasi Publik: Survei Kepuasan Pelayanan Publik Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	2 Tahun
85	Buku: a. Buku Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa TA 2020; b. Buku Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa TA 2020;	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	c. Buku Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa Proposionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI TA 2021; d. Buku Ringkasan Eksekutif Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang kesatuan bangsa proposionalitas pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI TA 2021; e. Buku rekomendasi kebijakan K/L di bidang kesatuan bangsa pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam menjaga kesatuan bangsa TA 2021; f. Buku ringkasan eksekutif rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam menjaga kesatuan bangsa TA 2021;					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	g. Buku rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dalam kerangka kesatuan bangsa TA 2021; h. Buku ringkasan eksekutif rekomendasi kebijakan k/l di bidang kesatuan bangsa kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dalam kerangka kesatuan bangsa TA 2021; i. Buku rekomendasi kebijakan K/L di bidang kesatuan bangsa perimbangan keuangan pusat daerah yang berkeadilan dalam rangka memperkukuh kesatuan bangsa TA 2021; j. Buku ringkasan eksekutif rekomendasi kebijakan K/L di bidang kesatuan bangsa perimbangan keuangan pusat daerah yang berkeadilan dalam rangka memperkukuh kesatuan bangsa TA 2021; dan k. Buku laporan tahunan deputi					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	bidang koordinasi kesatuan bangsa, kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2021.					
86	Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Tahun 2020-2024	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Juni 2019, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
87	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur tahun 2022	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	November 2021, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun
88	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur tahun 2021	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Januari 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
		3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.				
89	Laporan Kinerja (Lakin) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur TW 1, 2, 3, dan 4 tahun 2022	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 3. Kabag Program dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	April 2021, Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
90	Perjanjian Kinerja Eselon I dan II pada Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur tahun 2022	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 3. Kabag Program dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Januari 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun
91	Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Tahun 2020-2024	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Januari 2020 Kemenko Polhukam	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
		3. Kabag Program dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.				
92	Profil Pejabat	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 3. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	*Update* Januari 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
93	Data Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; dan 2. Kabag Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	*Update* Januari 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun
94	Survei Kepuasan Publik terhadap Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur melalui E-SIEVA	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Asisten Deputi di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	*Update* 2022 Kemenko Polhukam	Digital (E-SIEVA)	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang *Command Center* Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Kepala Biro HPH	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 16 Agustus 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
2	Lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 4 (7 unit mobil)	Subbagian Barang Milik Negara	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	21 Juni 2021, Kemenko Polhukam	Iklan dan brosur	1 tahun
3	Lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 4 pada Kompolnas	Subbagian Barang Milik Negara	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	19 Oktober 2021, Kemenko Polhukam	Iklan dan brosur	1 tahun
4	Lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 4 (6 unit mobil)	Subbagian Barang Milik Negara	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	21 Oktober 2021, Kemenko Polhukam	Iklan dan brosur	1 tahun
5	Lelang Barang Milik Negara berupa barang inventaris kantor	Subbagian Barang Milik Negara	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	11 Januari 2022, Kemenko Polhukam	Iklan dan brosur	1 tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
6	a. Penyampaian saran butir bicara kunjungan kehormatan Dubes Selandia Baru kepada Menko Polhukam b. Bahan butir bicara kunjungan kehormatan Dubes RRT c. Hasil Pertemuan *Leaders Retreat* RI – Singapura d. Rakor Tingkat Menteri membahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara	Tahun 2022, Kemenko Polhukam	*Hardcopy*	1 Tahun
7	Mendampingi Menko Polhukam dalam kunjungan kehormatan Dubes Turki di Kemenko Polhukam	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara	Tahun 2022, Kemenko Polhukam	*Hardcopy*	1 Tahun
8	Mendampingi Menko Polhukam dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam kunjungan kehormatan Dubes RRT	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Multilateral, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara	Tahun 2022, Kemenko Polhukam	*Hardcopy*	1 Tahun
9	Laporan Pelaksanaan Inpres 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Hardcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
10	(*Live*) Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa, tanggal 16 Desember 2020	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Digital (youtube)	5 Tahun
11	Video Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Digital	5 Tahun
12	(Live) Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah Tahun 2021	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi	Desember 2021, Hotel Bidakara, Jakarta	Digital (Youtube)	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 29 Januari 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
2	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 21 Oktober 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
3	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-12/MENKO/POLHUKAM/06/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 04/11/2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
4	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 11/11/2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
5	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 1 Desember 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
6	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 30 Desember 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
7	Instruksi Menteri No 1 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 17 Februari 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 2 Tahun Inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
8	Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia Dan Universitas Udayana tentang Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 31 Maret 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
9	Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 3 November 2021	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
10	Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penguatan Koordinasi Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 6 April 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
11	Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 31 Mei 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
12	Nota Kesepahaman Polhukam antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dan Kantor Staf Presiden tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jakarta, 21 Juni 2022	*Hardcopy* dan *Softcopy*	Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif
13	Permenko Polhukam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2016, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
14	Permenko Polhukam Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2017, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
15	Keputusan Menko Polhukam Nomor 74 tahun 2017 tentang Informasi jabatan di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2017, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
16	Kepmenko Polhukam Nomor 44 Tahun 2018 tentang SOP Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2018, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
17	Laporan Evaluasi Kelembagaan di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2018, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
18	Laporan Monev SOP di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2019, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
19	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2019-2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
20	Permenko Polhukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2021, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
21	Permenko Polhukam Nomor 6 tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Organisasi dan Tata Laksana	Tahun 2021, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	Selama tidak ada perubahan
22	Aplikasi LPSE Kemenko Polhukam (SIRUP)	Anggota UKPBJ	Anggota UKPBJ	Kemenko Polhukam	Pengadaan Barang Secara Elektronik	Setiap saat
23	Keputusan Menko Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Papua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2022.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Menko Polhukam	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
24	Kalender Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
25	Analisis Resiko Program Kerja dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	*Hardcopy* dan *Softcopy*	5 Tahun
26	Publikasi program kerja dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melalui Media Sosial.	Kepala Bagian Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Digital (Instagram @deputi1polhukam, Twitter @Deputi1Polhukam)	5 Tahun
27	a. Mendampingi Menko Polhukam menerima Audiensi Delegasi for Papua MPR RI di Rupat Nakula Kemenko Polhukam RI. b. Memimpin Rakor Tanggapan Pemri atas Komunikasi bersama SPMH PBB di Rupat Nakula Kemenko Polhukam c. Menghadiri Rapat Koordinasi Intelijen BNPT di Hotel Westin Jakarta d. Mendampingi Menko Polhukam	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Hardcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	menerima kunjungan DPD RI di Nakula e. Pelantikan dan Pelepasan Pejabat eselon III, IV, serta fungsional Kemenko Polhukam di Aula Bisma Kemenko Polhukam f. Menghadiri Rakortas dengan Agenda (1) Posisi Presidensi G20 Indonesia mengantisipasi situasi Rusia-Ukraina, (2) Dampak di sektor energi, pangan, supply-chain industri dan investasi g. Rakor lanjutan beasiswa luar negeri h. Rapat terkait Pemindahan Pegawai Kemenko Polhukam ke Ibu Kota Negara Baru i. Undangan Rakor Persiapan Kunjungan Menteri Luar Negeri Yunani ke Indonesia (virtual)					
28	a. Rapat virtual pembahasan draft MSP pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Indonesia – Kenya. b. Rapat virtual rencana kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini ke Indonesia. c. Survei dan persiapan teknis pertemuan ke-2 IISD di Hotel Mandarin Oriental, Hotel JS Luwansa, dan Hotel Raffles Jakarta.	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik Afrika, Deputi Bidang Koordinasi	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Hardcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	d. Menghadiri Rakor membahas Dinamika Keamanan di Laut Natuna di Rupat Nakula Kemenko Polhukam. e. Rakor antar K/L dalam rangka persiapan Pertemuan ke-4 *Joint Working Group on Combating International* antara Indonesia dan Filipina di Bogor. f. Memimpin Rakor Pembahasan Beasiswa Otsus di Luar Negeri di Rupat Deputi I. g. Rapat Koordinasi Virtual dengan Kedubes India soal Persiapan Pertemuan ke-2 IISD. h. Site Visit Hotel Raffles dengan Kedubes India dalam rangka Persiapan IISD ke-2. i. Rapat Teknis Internal Kemenko Polhukam Persiapan Pertamuan ke-2 IISD (virtual)	Politik Luar Negeri				
29	a. Rakor antara K/L pembahasan Konsepsi arah pengaturan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas di Rupat Nakula Kemenko Polhukam. b. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Perjanjian Payung Bidang Keamanan RI-Turki (Virtual). c. Menghadiri Rapat Interkem Persiapan	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Hardcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Kunjungan Presiden Turki ke Indonesia. d. Rapat Persiapan Kunjungan Presiden Portugal ke Indonesia. e. Rapat penyusunan posisi delegasi Indonesia dan permintaan bahan masukan dalam rangka pertemuan *The 6th Indonesia-European Union Political Dialogue* (virtual). f. Rapat koordinasi lanjutan tingkat pimpinan tinggi madya dengan pembahasan Pemberian Beasiswa Otsus. g. Rakor pembahasan keberadaan Museum Holocaust di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. h. Rapat Koordinasi membahas tindak lanjut pembahasan Implementing Arrangement Pelaksanaan Kerja Sama Konservasi USS Houston. i. Menjadi Delegasi RI Pertemuan JWG on CT RI-Filipina					
30	a. Rakor Persiapan Nasional Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. b. Menghadiri Undangan Delegasi RI untuk Rangkaian Pertemuan *35th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC.*	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN,	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi	*Hardcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	c. Undangan Delegasi RI untuk Rangkaian Pertemuan *35th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC.* d. FGD virtual Kebijakan Akses Kesehatan Masa Pademi dalam Rangka Penyusunan Laporan Universal Periodic Review ke-4. e. Menghadiri Undangan Delegasi RI untuk Rangkaian Pertemuan *35th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC*. f. Delegasi RI untuk Rangkaian kegiatan ARF terkait keamanan TIK dan Siber. g. Rapat untuk menindaklanjuti Hasil Rapat Keketuaan ASEAN dan Hasil Rapat Setnas ASEAN-Indonesia (virtual). h. FGD II Evaluasi Kajian "Penangguhan Hak Lintas Kapal Asing pada Selat Pelayaran Internasional dalam Konflik bersenjata dan Upaya Penguatan Asitektur Keamanan Maritim di Kawasan Indo-Pasifik. i. Rapat Interaksi dan Diskusi dengan Pemangku Kepentingan Daerah Mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri		Politik Luar Negeri		

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	j. Diskusi tentang potensi Kota Bitung dalam pemajuan kerja sama konektivitas di kawasan (Sub-Regional BIMP EAGA) guna mendukung Implementasi Klaster Kerjasama ASEAN *Outlook on the Indo Pacific.*					
31	a. Rapat Identifikasi Awal Isu-isu Kerjasama Multilateral Bidang Politik, Hukum, dan Kemanuasiaan Internasional. b. Rapat dengan *stakeholders* membahas Penyelarasan Naskah Akademik RUU Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (TPNW).	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Multilateral	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	*Hardcopy*	1 Tahun
32	Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	- Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
			- Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM			
33	Kebijakan non Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	- Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
34	Sambutan Pimpinan Unit Kerja	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
35	Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
36	Rekomendasi Kebijakan kepada Kementerian/Lembaga teknis	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Softcopy*	2 Tahun
37	Laporan Supervisi Uji Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
38	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
39	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum	Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	*Hardcopy* dan *Softcopy*	2 Tahun
40	Regulasi: a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia; c. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; d. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; e. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	f. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; g. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; h. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; i. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; j. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; k. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; l. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; m. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; n. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar; o. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; p. Peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sisten Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional; q. Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar; r. Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut; s. Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; t. Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; u. Perpres nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana v. Perpres Nomor 7 Tahun 221 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	pada Terorisme Tahun 2020-2024; w. Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024; x. Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan; y. Perpres Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; z. Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025; aa. Perpres Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna-Natuna Utara; bb. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; cc. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; dd. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keppres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; ee. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan ff. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.					
41	Regulasi dari Kemenko Polhukam: a. Peraturan menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam; b. Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam; dan c. Peraturan Menko Polhukam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
42	Produk Sambutan berkaitan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara: a. Sambutan Menko Polhukam dalam Seminar Studi Kawasan Paris Dikreg LXI Seskoad TA 2021 dengan judul "Strategi Pemerintah dalam Penanganan Perbatasan Darat RI-Malaysia; b. Pengarahan Menko Polhukam RI Selaku Ketua Pengarah badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pengawas Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu pada Kegiatan Peninjauan Kesiapan Peresmian PLBN Terpadu Sota, Kab Merauke pada 12 September 2021; c. Pengarahan Menko Polhukam RI pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Ranai, Kab Natuna pada 23 November 2021; d. Pembekalan Menko Polhukam pada Acara Rapim Kemhan Tahun 2022; e. Sambutan Menko Polhukam pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Keluarga Besar Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Islam	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, 22 Januari 2022; f. Sambutan Deputi IV/Hanneg Polhukam pada Pembukaan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Kebijakan Strategis dalam Merealisasikan Penataan dan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dalam Pembangunan IKN NUsantara pada Maret 2022; g. Sambutan Deputi IV/Hanneg Polhukam pada acara Penutupan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Kebijakan Strategis dalam Merealisasikan Penataan dan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dalam Pembangunan IKN Nusantara pada Maret 2022; dan h. Pengarahan Menko Polhukam RI Selaku Ketua Pengarah badan Nasional pengelola Perbatasan pada Kegiatan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 24 Mei 2022.					
43	Peraturan Menteri Koordinator Bidang	Unit Kerja	Sekretaris Deputi	Tahun	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
44	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	2 Tahun
45	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas keputusan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
46	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	1 Tahun
47	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*	1 Tahun
48	Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Softcopy*/ Digital (Website/IG)	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
49	DIPA Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	*Hardcopy* dan *Softcopy*	1 Tahun
50	Regulasi a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; d. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; e. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; f. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia; g. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; h. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan	Kementerian Sekretariat Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	5 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Lingkungan Hidup; i. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; j. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; k. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; l. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; m. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; n. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; o. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; p. UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; q. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; r. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	s. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; t. UU Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU; u. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU; v. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; w. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; x. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara y. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	z. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan; aa. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; bb. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara; cc. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dd. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024; dan ee. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
51	Regulasi dari Kemenko Polhukam: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	5 Tahun
52	Berita Kemenko Polhukam: Diseminasi Informasi Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa a. Sambutan Perayaan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili Tingkat Nasional, dengan Tema "Seorang Junzi (Insan Beriman dan Berbudi) Hidup Dalam Tengah Sempurna, Xiaoren (Manusia Rendah Budi) Hidup Menentang Tengah Sempurna", tanggal 17 Januari 2022, Jakarta; b. Sambutan Studium General Menko Polhukam di Universitas negeri Yogyakarta, dengan Tema "Penguatan Iklim Akademik Menuju *World Class University*", tanggal 26 Januari 2022, Yogyakarta; c. Sambutan Pengukuhan Pengurus Besar NU dan Harlah NU ke-96	Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	*Softcopy*	2 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	dengan tema "Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama: Merawat Jagad, Membangun Peradaban", tanggal 31 Januari 2022, di Balikpapan; d. Sambutan Rapat pimpinan nasional Jam'iyyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia (Jatmi), dengan tema "Penguatan Amaliyah Thoriqoh dalam Menghadapi Radikalisme, Terorisme, dan Covid-19", tanggal 3 Februari 2022, di Jakarta; e. Sambutan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan tema "Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Kesatuan Bangsa", tanggal 18 Februari 2022, di Jakarta, via *Zoom*; f. Sambutan Seminar Nasional DPR RI, dengan tema "HB Jassin Pahlawan Peradaban Indonesia", tanggal 23 Februari 2022, Jakarta; g. Sambutan *Forum Group Discussion* (FGD) Akseptasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Standar Materi Pembidaan Ideologi Pancasila bagi Hakim", tanggal 24 Februari					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	2022, di Jakarta; h. Sambutan Diskusi Panel PPRA LXIII Lemhannas RI Tahun 2022, dengan tema "Penataan Sistem Ketatanegaraan RI setelah Perubahan UUD 1945", tanggal 7 Maret 2022 di Jakarta, via *Zoom*; i. Sambutan Pembekalan Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkata 181 dan 182 dengan tema "Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa", tanggal 9 Maret 2022, di Jakarta, via *Zoom*; j. Sambutan Dialog Kebangsaan Manajemen Talenta Perguruan Tinggi Universitas Andalas dengan Tema "Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Talenta Emas Indonesia 2045" tanggal 10 Maret 2022, di Jakarta, via *zoom*; k. Sambutan Musyawarah Qubro (Munas) Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah (Jatman), dengan tema "Membumikan Nilai-nilai Luhur Thoriqoh untuk Memperkokoh NKRI", tanggal 13 Maret 2022, di Bengkulu;					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	l. Sambutan Pembukaan Pengenalan Akademik dan Kegiatan Mahasiswa (Pakem) Universitas Semarang, dengan tema "Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" tanggal 19 Maret 2022, di Jakarta, via *zoom*; m. Sambutan Diskusi Kementerian LHK, dengan tema "Membahas Langkah Operasional Penerapan Forest City di IKN", tanggal 22 Maret 2022, Balikpapan; n. Sambutan Wisuda Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Periode III dan IV Tahun Akademik 2021/2022, UII, tanggal 26 Maret 2022, di Yogyakarta; o. Sambutan Ramah Tamah Bedhol Kampus FH UII, tanggal 26 Maret 2022, di Yogyakarta; p. Sambutan Pengukuhan DPP PA GMNI, dengan tema "Gotong Royong Wujudkan Transformsi Bangsa"tanggal 26 Maret 2022, di Jakarta; q. Sambutan Sarasehan Fakultas Hukum UII dan DPP IKA UII, dengan tema "Peran Perguruan Tinggi dan Alumni dalam Membangun Penegakan					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Hukum yang Berkeadilan", tanggal 27 Maret 2022; r. Sambutan Diskusi Publik PP GMNKI dengan tema "Meneladani Sabam Sirait dalam Berjuang Bagi Demokrasi dan HAM di Indonesia", tanggal 28 Maret 2022, di Jakarta; s. Sambutan Selebrasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara, tanggal 30 Maret 2022, di Yogyakarta; t. Ceramah Tarawih Ramadhan Masjid Kampus UGM, dengan tema "Titik Temu Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekuler dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", tanggal 3 April 2022, di Yogyakarta; u. Sambutan Webinar Nasional CIDES ICMI dengan tema "Komunisme dan Radikalisme dalam Pandangan Islam"tanggal 18 April 2022, di Jakarta; dan v. Sambutan Halal Bihalal Universitas Insan Cita Indonesia, dengan tema "Menegakkan Demorasi di Era Digital untuk keadilan dan Kesejahteraan" tanggal 11 Mei 2022, di Jakarta, via *Zoom*.					

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
53	Laporan Pelaksanaan Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-butir Komitmen Kepala Daerah Tahun 2021	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintah an	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Desember 2021, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun
54	Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik dengan Tema Optimalisasi pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR! Dalam Rangka Menjamin Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Maret 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
55	Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan Tema Mewujudkan Pemerintah Suleawesi Selatan yang Bersih, Melayani, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi Melalui Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Komitmen Pimpinan	1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintah an	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	April 2022, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun
56	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Desember 2021, Kemenko Polhukam	*Softcopy*	1 Tahun
57	Berita tentang pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	1.Sekretaris Deputi Bidang	1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi,	Januari s.d. Desember 2021 serta	Digital (media sosial)	1 Tahun

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
		Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; 2. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Informasi, dan Aparatur; 2. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.	Januari s.d Mei 2022, Kemenko Polhukam		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

M. Nazif, M Tr.(Han)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

M. NAZIF

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat